

KONTRAK PENELITIAN DASAR UNHAS

Tahun Anggaran 2021

Nomor : 915/UN4.22/PT.01.03/2021

Pada hari ini Senin Tanggal Dua belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh satu kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kampus Unhas Tamalanrea Makassar selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Agustina Abdullah, S.Pt., M.Si., IPM : Dosen Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama mengikatkan diri dalam suatu kontrak Penelitian Dasar Unhas Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Dasar Unhas Tahun Anggaran 2021 dengan judul Model Transformasi Kelembagaan Penyuluhan dalam Meningkatkan Hilirisasi Inovasi Teknologi untuk Keberdayaan Peternak Sapi Potong, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 2215/UN4.1/KEP/2021 Tanggal 9 April 2021 tentang Penetapan Dosen Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 72.500.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DPAU PTN Badan Hukum Unhas Tahun Anggaran 2021 Alokasi LPPM Unhas.

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayar dana penelitian kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu 70% x Rp. 72.500.000,- = Rp. 50.750.000,- (Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan revisi proposal dan revisi anggaran (sesuai kontrak).
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 30% x Rp. 72.500.000,- = Rp. 21.750.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan lengkap hasil penelitian, catatan harian, luaran penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang sudah di validasi oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut :

Nama : Dr. Agustina Abdullah, S.Pt., M.Si., IPM
Nomor Rekening :
Nama Bank : Bank Negara Indonesia

- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarkan sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak tanggal 12 April 2021 dan berakhir tanggal 15 November 2021.

Pasal 5 Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa laporan kemajuan dan laporan akhir, catatan harian, luaran penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Laporan Kemajuan, Catatan Harian dan luaran penelitian paling lambat 15 Juli 2021.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA laporan akhir lengkap, catatan harian, luaran penelitian : Publikasi Jurnal Internasional bereputasi (Minimal Q3 di scimago.jr); atau setara dengan 2 prosiding internasional terindeks scopus; dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) yang telah diunggah paling lambat 25 Oktober 2021.
- (4) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) beserta bukti pembelanjaan dan bukti setoran pajak diarsipkan secara tertib dan teratur oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk/Ukuran kertas A4;
 - b. Warna sampul Biru

Pasal 6 Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2021.

Pasal 7 Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penelitian kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Rekening Rektor Universitas Hasanuddin.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini telah berakhir, namun PIHAK KEDUA belum menyerahkan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang apabila tidak dapat dilunasi oleh PIHAK KEDUA, akan berdampak pada kesempatan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan akidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetorkan ke Rekening Rektor Universitas Hasanuddin.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Hasanuddin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si.
NIP 196201181987022011

PIHAK KEDUA

Dr. Agustina Abdullah, S.Pt., M.Si., IPM
NIP 197008172006042001

SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

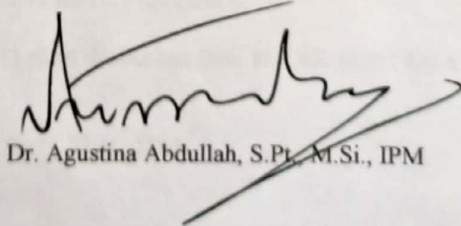
Yang bertandatangan di bawah ini ketua pelaksana menyatakan bahwa :

1. Saya bertanggungjawab penuh dan sanggup melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah yang berlaku dan berdasarkan persetujuan anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Kontrak Penelitian Dasar Unhas antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin dengan ketua pelaksana, untuk kegiatan "Model Transformasi Kelembagaan Penyuluhan Dalam Meningkatkan Hilirisasi Inovasi Teknologi Untuk Keberdayaan Peternak Sapi Potong", Nomor: 915/UN4.22/PT.01.03/2021 Tanggal 12 April 2021.
2. Saya menerima dana sesuai tahapan pada kontrak sebesar Rp. 72.500.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan konsekuensi potongan pajak terkait dan menggunakan sesuai dengan peruntukannya :
 - Tahap I (70%) = Rp. 50.750.000,-
 - Tahap II (30%) = Rp. 21.750.000,-
3. Jumlah dana tersebut pada poin 2 (dua) benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan penelitian yang dimaksud.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa :
 - a. Proposal dan revisi proposal sesuai anggaran yang diberikan;
 - b. Laporan kemajuan dan catatan harian paling lambat 30 Juni 2021;
 - c. Laporan akhir lengkap, catatan harian, luaran penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) yang telah diunggah paling lambat 25 November 2021;
 - d. Luaran penelitian berupa :
 - Publikasi Jurnal Internasional bereputasi (minimal Q3 di scimago.jr); atau
 - setara dengan 2 prosiding internasional terindeks scopus bereputasi internasional).
 - e. Laporan dan output tersebut diserahkan dan diunggah tepat waktu tanpa beralasan tidak bisa memenuhi laporan dan output penelitian akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
5. Bersedia diperiksa oleh aparat pemeriksa fungsional bilamana diperlukan.
6. Mengarsipkan semua dokumen laporan kegiatan dan luaran penelitian serta Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (bukti pembelanjaan dan bukti setoran pajak) secara tertib dan teratur.
7. Apabila pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan tanggungjawab mutlak ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 April 2021

Ketua Pelaksana,



Dr. Agustina Abdullah, S.Pt., M.Si., IPM